



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan; Lampiran D Butir 1 huruf h Peraturan Menteri dalam Negeri Nor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa pada kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan...../4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);
30. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 33);
31. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:...../6

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
8. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
9. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.
10. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
11. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

12. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 13. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.
2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1A dan Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya dalam APBD akibat:
 - a. Penyesuaian dana transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan sesuai ketentuan butir C. 2. b. 5) a) (7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur belum sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program (RAP).
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 1B

Pendanaan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat menggunakan:

- a. belanja tidak terduga;
 - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp4.318.215.566.177,00 tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp4.318.215.566.177,00, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	
a.	Semula	Rp.4.318.215.566.177,00
b.	Bertambah/ (Berkurung)	Rp.0,00
	Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp.4.318.215.566.177,00
2.	Belanja Daerah	
a.	Belanja Daerah	Rp. 4.820.033.558.744,00
b.	Bertambah/ (Berkurung)	0,00
	Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 4.820.033.558.744,00
3.	Surplus/(Defisit)	Rp.501.817.992.567,00
4.	Pembiayaan Daerah	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
	Semula	Rp501.817.992.567,00
	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.0,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp501.817.992.567,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.0,00
	Semula	
	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.0,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.501.817.992.567,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0,00
4.	Pasal 3 dihapus.	
5.	Pasal 4 dihapus.	
6.	Pasal 5 dihapus.	
7.	Pasal 6 dihapus.	
8.	Pasal 7 dihapus.	
9.	Pasal 8 dihapus.	
10.	Pasal 9 dihapus.	
11.	Pasal 10 dihapus.	
12.	Pasal 11 dihapus.	
13.	Pasal 12 dihapus.	

14. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

1. Lampiran I...../9

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.a : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran III.b : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IV.a : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IV.b : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran V.a : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran V.b : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VI.a : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VI.b : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VI.c : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kampung;
12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi *) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14. Lampiran IX...../10

- 14 Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 15 Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perdatentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Februari 2024

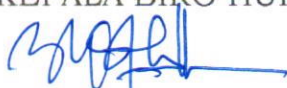
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	536.032.229.926,00	536.032.229.926,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	528.451.996.209,00	528.451.996.209,00	0,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	107.215.449.309,00	107.215.449.309,00	0,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	270.913.016,00	270.913.016,00	0,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	270.913.016,00	270.913.016,00	0,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	10.365.746.064,00	10.365.746.064,00	0,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	9.582.324.006,00	9.582.324.006,00	0,00
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	52.851.839,00	52.851.839,00	0,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	730.570.219,00	730.570.219,00	0,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	60.960.896.666,00	60.960.896.666,00	0,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	59.073.479.068,00	59.073.479.068,00	0,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	974.611.095,00	974.611.095,00	0,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	912.806.503,00	912.806.503,00	0,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	602.729.361,00	602.729.361,00	0,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	330.717.601,00	330.717.601,00	0,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	69.554.968,00	69.554.968,00	0,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	202.456.792,00	202.456.792,00	0,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	244.430.412,00	244.430.412,00	0,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	180.861.187,00	180.861.187,00	0,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	28.199.048,00	28.199.048,00	0,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	35.370.177,00	35.370.177,00	0,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	12.789.257.704,00	12.789.257.704,00	0,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	9.738.043.854,00	9.738.043.854,00	0,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1.114.920.232,00	1.114.920.232,00	0,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1.936.293.618,00	1.936.293.618,00	0,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6.193.700.811,00	6.193.700.811,00	0,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	2.662.671.979,00	2.662.671.979,00	0,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	3.302.481.271,00	3.302.481.271,00	0,00
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	11.768.034,00	11.768.034,00	0,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	216.779.527,00	216.779.527,00	0,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	2.506.314.453,00	2.506.314.453,00	0,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	1.566.697.167,00	1.566.697.167,00	0,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	925.581.926,00	925.581.926,00	0,00
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	4.761.998,00	4.761.998,00	0,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	9.273.362,00	9.273.362,00	0,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	16.312.063,00	16.312.063,00	0,00

4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	16.312.063,00	16.312.063,00	0,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	13.094.021.336,00	13.094.021.336,00	0,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	12.527.050.214,00	12.527.050.214,00	0,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	566.971.122,00	566.971.122,00	0,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	33.568.784,00	33.568.784,00	0,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	32.372.478,00	32.372.478,00	0,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	1.196.306,00	1.196.306,00	0,00
4.1.01.01.13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	137.558.639,00	137.558.639,00	0,00
4.1.01.01.13.0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	30.276.656,00	30.276.656,00	0,00
4.1.01.01.13.0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	7.689.526,00	7.689.526,00	0,00
4.1.01.01.13.0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	99.592.457,00	99.592.457,00	0,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	36.729.623.000,00	36.729.623.000,00	0,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	28.521.961,00	28.521.961,00	0,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	28.521.961,00	28.521.961,00	0,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.204.121.799,00	1.204.121.799,00	0,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.204.121.799,00	1.204.121.799,00	0,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	10.322.633.465,00	10.322.633.465,00	0,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	10.322.633.465,00	10.322.633.465,00	0,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	70.425.185,00	70.425.185,00	0,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	70.425.185,00	70.425.185,00	0,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	7.003.143.010,00	7.003.143.010,00	0,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	7.003.143.010,00	7.003.143.010,00	0,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1.736.135.293,00	1.736.135.293,00	0,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1.736.135.293,00	1.736.135.293,00	0,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	520.112.968,00	520.112.968,00	0,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	520.112.968,00	520.112.968,00	0,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	21.399.626,00	21.399.626,00	0,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	21.399.626,00	21.399.626,00	0,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	15.639.394.202,00	15.639.394.202,00	0,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	15.639.394.202,00	15.639.394.202,00	0,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	93.522.415,00	93.522.415,00	0,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	93.522.415,00	93.522.415,00	0,00
4.1.01.02.12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	90.213.076,00	90.213.076,00	0,00
4.1.01.02.12.0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	90.213.076,00	90.213.076,00	0,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	47.046.267.609,00	47.046.267.609,00	0,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	33.049.947.537,00	33.049.947.537,00	0,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	33.049.947.537,00	33.049.947.537,00	0,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	13.996.320.072,00	13.996.320.072,00	0,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	13.996.320.072,00	13.996.320.072,00	0,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	227.000.000.000,00	227.000.000.000,00	0,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	227.000.000.000,00	227.000.000.000,00	0,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	227.000.000.000,00	227.000.000.000,00	0,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	110.460.656.291,00	110.460.656.291,00	0,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	110.460.656.291,00	110.460.656.291,00	0,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	110.460.656.291,00	110.460.656.291,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.578.233.717,00	7.578.233.717,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.025.812.717,00	3.025.812.717,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.025.812.717,00	3.025.812.717,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.025.812.717,00	3.025.812.717,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.552.421.000,00	4.552.421.000,00	0,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.552.421.000,00	4.552.421.000,00	0,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB- Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	4.552.421.000,00	4.552.421.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.704.261.413.000,00	2.704.261.413.000,00	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.704.261.413.000,00	2.704.261.413.000,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.457.010.015.000,00	1.457.010.015.000,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	791.999.916.000,00	791.999.916.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	105.864.053.000,00	105.864.053.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	127.014.505.000,00	127.014.505.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	523.799.665.000,00	523.799.665.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.977.982.000,00	3.977.982.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	31.343.711.000,00	31.343.711.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	499.566.704.000,00	499.566.704.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	465.997.143.000,00	465.997.143.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.306.636.000,00	2.306.636.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16.125.094.000,00	16.125.094.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	15.137.831.000,00	15.137.831.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	154.228.879.000,00	154.228.879.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	51.654.241.000,00	51.654.241.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	23.758.753.000,00	23.758.753.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	70.885.581.000,00	70.885.581.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.930.304.000,00	7.930.304.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	11.214.516.000,00	11.214.516.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	5.063.290.000,00	5.063.290.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	176.462.000,00	176.462.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	35.579.000,00	35.579.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.300.256.000,00	1.300.256.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	1.623.500.000,00	1.623.500.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0032	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	2.607.929.000,00	2.607.929.000,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	1.247.251.398.000,00	1.247.251.398.000,00	0,00
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	578.339.101.000,00	578.339.101.000,00	0,00
4.2.01.03.01.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	578.339.101.000,00	578.339.101.000,00	0,00
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	668.912.297.000,00	668.912.297.000,00	0,00
4.2.01.03.04.0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	668.912.297.000,00	668.912.297.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.077.921.923.251,00	1.077.921.923.251,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.077.921.923.251,00	1.077.921.923.251,00	0,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.077.921.923.251,00	1.077.921.923.251,00	0,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.077.921.923.251,00	1.077.921.923.251,00	0,00

4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.077.921.923.251,00	1.077.921.923.251,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	4.318.215.566.177,00	4.318.215.566.177,00	0,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.482.168.966.591,00	2.482.757.786.357,00	588.819.766,00
5.1.01	Belanja Pegawai	372.436.870.577,00	372.723.670.577,00	286.800.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	82.008.970.351,00	82.008.970.351,00	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	54.546.011.077,00	53.986.718.197,00	-559.292.880,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	54.546.011.077,00	53.986.718.197,00	-559.292.880,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	4.996.718.851,00	5.434.689.365,00	437.970.514,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.996.718.851,00	5.434.689.365,00	437.970.514,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	2.046.463.996,00	728.964.000,00	-1.317.499.996,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2.046.463.996,00	728.964.000,00	-1.317.499.996,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	350.000.000,00	69.608.833,00	-280.391.167,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	350.000.000,00	69.608.833,00	-280.391.167,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.651.708.579,00	2.700.248.579,00	48.540.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.651.708.579,00	2.700.248.579,00	48.540.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	4.654.435.027,00	5.023.899.407,00	369.464.380,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	4.654.435.027,00	5.023.899.407,00	369.464.380,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	482.129.934,00	192.389.698,00	-289.740.236,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	482.129.934,00	192.389.698,00	-289.740.236,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	204.336.031,00	1.173.078,00	-203.162.953,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	204.336.031,00	1.173.078,00	-203.162.953,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.105.352.196,00	3.304.236.278,00	198.884.082,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.105.352.196,00	3.304.236.278,00	198.884.082,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	357.313.953,00	146.242.104,00	-211.071.849,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	357.313.953,00	146.242.104,00	-211.071.849,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	381.941.841,00	438.726.892,00	56.785.051,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	381.941.841,00	438.726.892,00	56.785.051,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.128.872.797,00	2.862.112.851,00	733.240.054,00
KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.128.872.797,00	2.862.112.851,00	733.240.054,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	6.103.686.069,00	7.119.961.069,00	1.016.275.000,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	6.103.686.069,00	7.119.961.069,00	1.016.275.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	217.382.048.732,00	217.382.048.732,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	214.766.048.732,00	214.766.048.732,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	214.766.048.732,00	214.766.048.732,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.616.000.000,00	2.616.000.000,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.616.000.000,00	2.616.000.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.058.903.633,00	24.345.703.633,00	286.800.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.845.408.833,00	7.845.408.833,00	0,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	2.251.524.435,00	2.251.524.435,00	0,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	771.322.083,00	771.322.083,00	0,00
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	423.416.408,00	423.416.408,00	0,00
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	994.145.907,00	994.145.907,00	0,00

5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	16.213.494.800,00	16.500.294.800,00	286.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.671.744.800,00	9.950.384.800,00	278.640.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.541.750.000,00	6.549.910.000,00	8.160.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.037.281.500,00	25.037.281.500,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.144.800.000,00	1.144.800.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.144.800.000,00	1.144.800.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	498.624.000,00	498.624.000,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	498.624.000,00	498.624.000,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	172.511.360,00	172.511.360,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	172.511.360,00	172.511.360,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89.040.000,00	89.040.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89.040.000,00	89.040.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.291.080.000,00	1.291.080.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.291.080.000,00	1.291.080.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	167.018.250,00	167.018.250,00	0,00
KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	167.018.250,00	167.018.250,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	33.647.250,00	33.647.250,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	33.647.250,00	33.647.250,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.880.000.000,00	5.880.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.880.000.000,00	5.880.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.024.560.640,00	6.024.560.640,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	80.673.600,00	80.673.600,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.927.040,00	5.927.040,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.936.000.000,00	5.936.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.266.000.000,00	7.266.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.266.000.000,00	7.266.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	154.470.677,00	154.470.677,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.490.000,00	77.490.000,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.490.000,00	77.490.000,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.371.400,00	6.371.400,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.371.400,00	6.371.400,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	847,00	847,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	847,00	847,00	0,00
KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5

5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.097.120,00	5.097.120,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.097.120,00	5.097.120,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	305.828,00	305.828,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	305.828,00	305.828,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	917.482,00	917.482,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	917.482,00	917.482,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.1.01.07	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	22.335.195.684,00	22.335.195.684,00	0,00
5.1.01.07.01	Belanja Uang Representasi MRP	1.203.930.000,00	1.203.930.000,00	0,00
5.1.01.07.01.0001	Belanja Uang Representasi MRP	1.203.930.000,00	1.203.930.000,00	0,00
5.1.01.07.02	Belanja Tunjangan Keluarga MRP	168.550.200,00	168.550.200,00	0,00
5.1.01.07.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga MRP	168.550.200,00	168.550.200,00	0,00
5.1.01.07.03	Belanja Tunjangan Beras MRP	410.424.000,00	410.424.000,00	0,00
5.1.01.07.03.0001	Belanja Tunjangan Beras MRP	410.424.000,00	410.424.000,00	0,00
5.1.01.07.04	Belanja Uang Paket MRP	103.194.000,00	103.194.000,00	0,00
5.1.01.07.04.0001	Belanja Uang Paket MRP	103.194.000,00	103.194.000,00	0,00
5.1.01.07.05	Belanja Tunjangan Jabatan MRP	1.745.698.500,00	1.745.698.500,00	0,00
5.1.01.07.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan MRP	1.745.698.500,00	1.745.698.500,00	0,00
5.1.01.07.06	Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP	129.276.000,00	129.276.000,00	0,00
5.1.01.07.06.0001	Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP	129.276.000,00	129.276.000,00	0,00
5.1.01.07.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP	3.264.300.000,00	3.264.300.000,00	0,00
5.1.01.07.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP	3.264.300.000,00	3.264.300.000,00	0,00
5.1.01.07.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP	17.682.000,00	17.682.000,00	0,00
5.1.01.07.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP	17.682.000,00	17.682.000,00	0,00
5.1.01.07.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP	15.292.140.984,00	15.292.140.984,00	0,00
5.1.01.07.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP	106.908.984,00	106.908.984,00	0,00
5.1.01.07.12.0003	Belanja Jaminan Kematian MRP	515.970.000,00	515.970.000,00	0,00
5.1.01.07.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan MRP	14.669.262.000,00	14.669.262.000,00	0,00
KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.746.645.088.021,00	1.746.947.107.787,00	302.019.766,00
5.1.02.01	Belanja Barang	643.072.901.552,00	643.558.969.194,00	486.067.642,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	632.229.201.552,00	632.715.269.194,00	486.067.642,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	84.542.250,00	84.542.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.911.780.000,00	12.921.980.000,00	10.200.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	9.434.022.250,00	9.434.022.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	35.566.500,00	35.566.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.810.288.000,00	18.810.288.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	239.636.200,00	239.636.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	200.998.100,00	200.998.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.507.794.700,00	1.507.794.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.755.065.261,00	19.900.367.241,00	145.301.980,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.440.137.418,00	6.480.741.438,00	40.604.020,00

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.430.124.724,00	27.410.669.366,00	-19.455.358,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.109.926.000,00	2.110.646.000,00	720.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	406.267.128,00	406.267.128,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.924.062.827,00	2.924.062.827,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.806.070.336,00	1.806.070.336,00	0,00
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	979.988.800,00	979.988.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.041.853.200,00	1.041.853.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	942.984.000,00	971.484.000,00	28.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.811.191.651,00	4.811.533.651,00	342.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.181.845.959,00	2.181.845.959,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	110.795.435,00	110.795.435,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	150.228.623.150,00	150.228.623.150,00	0,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	121.169.494.923,00	121.169.494.923,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.352.749.000,00	11.352.749.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	11.297.944.000,00	11.297.944.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	118.368.900,00	118.368.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.322.368.640,00	77.618.368.640,00	296.000.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	87.149.270.580,00	87.149.270.580,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	49.265.503.600,00	49.249.358.600,00	-16.145.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	238.000.000,00	238.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.907.700.000,00	1.907.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	628.950.000,00	628.950.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	409.008.700,00	409.008.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	522.812.600,00	522.812.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.591.720,00	11.591.720,00	0,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	761.500.000,00	761.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.711.850.000,00	1.711.850.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	817.075.000,00	817.075.000,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	10.843.700.000,00	10.843.700.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0100	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	544.000.000,00	544.000.000,00	0,00

5.1.02.01.04.0602	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0621	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	456.615.041.617,00	457.974.415.741,00	1.359.374.124,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	150.609.339.206,00	150.122.811.206,00	-486.528.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	289.650.000,00	310.050.000,00	20.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.479.619.500,00	22.479.619.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.265.444.000,00	17.237.344.000,00	-28.100.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	499.000.000,00	499.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	214.480.000,00	214.480.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	496.800.000,00	496.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	291.500.000,00	291.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.926.500.000,00	2.956.500.000,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.535.722.000,00	5.535.722.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.921.900.000,00	16.072.560.000,00	150.660.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.413.616.000,00	9.247.872.000,00	-165.744.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.162.016.000,00	4.162.016.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	19.578.912.871,00	19.578.912.871,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	9.519.092.000,00	9.387.092.000,00	-132.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	263.755.800,00	263.755.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.858.316.385,00	2.858.316.385,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	273.200.000,00	273.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.691.038.000,00	5.691.038.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	204.400.000,00	204.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	1.532.134.350,00	1.532.134.350,00	0,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	826.500.000,00	826.500.000,00	0,00
KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	22.212.142.300,00	21.850.398.300,00	-361.744.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	1.910.000.000,00	1.910.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.495.056.000,00	39.423.268.124,00	1.928.212.124,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	856.972.900,00	856.972.900,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	1.071.239.224,00	1.071.239.224,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	32.700.000.000,00	32.700.000.000,00	0,00

5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.940.856.000,00	1.940.856.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	2.854.200.000,00	2.854.200.000,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	278.800.000,00	278.800.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	278.800.000,00	278.800.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	67.960.924.280,00	67.999.914.280,00	38.990.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.421.571.240,00	10.421.571.240,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	17.977.426.040,00	18.016.416.040,00	38.990.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.669.900.000,00	2.669.900.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	26.531.065.000,00	26.531.065.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.450.072.000,00	5.450.072.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.910.890.000,00	4.910.890.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.614.994.400,00	40.293.694.400,00	-321.300.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	4.691.250.000,00	4.691.250.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	390.500.000,00	390.500.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	27.403.744.400,00	27.082.444.400,00	-321.300.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	3.575.000.000,00	3.575.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4.504.500.000,00	4.504.500.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	49.833.399.406,00	50.033.399.406,00	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.995.067.323,00	1.995.067.323,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	9.972.362.000,00	9.972.362.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	4.788.800.000,00	4.788.800.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.737.170.083,00	1.737.170.083,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	11.280.000.000,00	11.480.000.000,00	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	3.160.000.000,00	3.160.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	80.860.668.325,00	80.860.668.325,00	0,00
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi	3.187.163.782,00	3.187.163.782,00	0,00

5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	67.031.339.750,00	67.031.339.750,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	4.432.840.793,00	4.432.840.793,00	0,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	459.324.000,00	459.324.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.773.760.000,00	28.773.760.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	21.944.000.000,00	21.944.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.380.000.000,00	2.380.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.899.760.000,00	1.899.760.000,00	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	188.100.000,00	188.100.000,00	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	188.100.000,00	188.100.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	82.781.792.072,00	82.781.792.072,00	0,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.902.750.000,00	1.902.750.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	1.542.500.000,00	1.542.500.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	360.250.000,00	360.250.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.274.024.200,00	35.274.024.200,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.502.578.300,00	2.502.578.300,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	501.970.000,00	501.970.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.439.340.000,00	28.439.340.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	38.215.900,00	38.215.900,00	0,00
5.1.02.03.02.0201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.298.939.872,00	30.298.939.872,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13.057.325.496,00	13.057.325.496,00	0,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.041.614.376,00	1.041.614.376,00	0,00

5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.067.718.000,00	14.067.718.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	9.002.718.000,00	9.002.718.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	1.238.360.000,00	1.238.360.000,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	1.238.360.000,00	1.238.360.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	366.418.386.780,00	364.874.964.780,00	-1.543.422.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	362.631.944.880,00	361.088.522.880,00	-1.543.422.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	333.744.716.880,00	332.201.294.880,00	-1.543.422.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.588.848.000,00	23.588.848.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.463.221.000,00	3.463.221.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.835.159.000,00	1.835.159.000,00	0,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.786.441.900,00	3.786.441.900,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	3.786.441.900,00	3.786.441.900,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	192.394.135.000,00	192.394.135.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	192.394.135.000,00	192.394.135.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.539.000.000,00	3.539.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	169.631.135.000,00	169.631.135.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	19.224.000.000,00	19.224.000.000,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.362.831.000,00	5.362.831.000,00	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.362.831.000,00	5.362.831.000,00	0,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.362.831.000,00	5.362.831.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	228.851.007.842,00	228.851.007.842,00	0,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	95.054.090.000,00	95.054.090.000,00	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	95.054.090.000,00	95.054.090.000,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	95.054.090.000,00	95.054.090.000,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	133.796.917.842,00	133.796.917.842,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	81.896.917.842,00	83.396.917.842,00	1.500.000.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan			

5.1.05.05.02.0001	Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	81.896.917.842,00	83.396.917.842,00	1.500.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.800.000.000,00	17.300.000.000,00	-1.500.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.800.000.000,00	17.300.000.000,00	-1.500.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00	0,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	134.236.000.151,00	134.236.000.151,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	122.246.000.151,00	122.246.000.151,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	122.246.000.151,00	122.246.000.151,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	122.246.000.151,00	122.246.000.151,00	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.990.000.000,00	3.990.000.000,00	0,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.990.000.000,00	3.990.000.000,00	0,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.990.000.000,00	3.990.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.802.152.737.224,00	1.808.922.240.224,00	6.769.503.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.904.317.000,00	31.492.685.000,00	3.588.368.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	27.904.317.000,00	31.492.685.000,00	3.588.368.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	22.556.205.000,00	26.144.573.000,00	3.588.368.000,00
KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	9.511.148.000,00	13.099.516.000,00	3.588.368.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	13.045.057.000,00	13.045.057.000,00	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.348.112.000,00	5.348.112.000,00	0,00
5.2.01.01.03.0003	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	5.348.112.000,00	5.348.112.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.889.103.154,00	169.566.645.154,00	-322.458.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	182.886.000,00	182.886.000,00	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	32.886.000,00	32.886.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	32.886.000,00	32.886.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	61.880.468.150,00	62.099.268.150,00	218.800.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	49.795.310.500,00	50.014.110.500,00	218.800.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	20.607.900.000,00	22.207.900.000,00	1.600.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	27.387.410.500,00	26.006.210.500,00	-1.381.200.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	12.085.157.650,00	12.085.157.650,00	0,00

5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	3.861.508.300,00	3.861.508.300,00	0,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	5.523.649.350,00	5.523.649.350,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	128.366.300,00	128.366.300,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.366.300,00	8.366.300,00	0,00
5.2.02.03.01.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	8.366.300,00	8.366.300,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	9.991.121.000,00	9.991.121.000,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	9.991.121.000,00	9.991.121.000,00	0,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	2.197.625.000,00	2.197.625.000,00	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	7.643.496.000,00	7.643.496.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.158.115.389,00	18.525.016.389,00	-633.099.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	929.583.800,00	929.583.800,00	0,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	304.290.000,00	304.290.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	94.888.200,00	94.888.200,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	450.405.600,00	450.405.600,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.924.718.189,00	17.291.619.189,00	-633.099.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	11.999.626.819,00	10.732.927.819,00	-1.266.699.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	24.346.400,00	24.346.400,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.107.619.170,00	1.741.219.170,00	633.600.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	288.486.700,00	288.486.700,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.331.293.100,00	4.331.293.100,00	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	173.346.000,00	173.346.000,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	303.813.400,00	303.813.400,00	0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	57.088.200,00	57.088.200,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	246.725.200,00	246.725.200,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.077.390.381,00	12.077.390.381,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11.463.269.100,00	11.463.269.100,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	130.055.300,00	130.055.300,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.181.765.800,00	11.181.765.800,00	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	45.675.000,00	45.675.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	105.773.000,00	105.773.000,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	614.121.281,00	614.121.281,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	322.301.281,00	322.301.281,00	0,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	95.820.000,00	95.820.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.355.200,00	7.355.200,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.355.200,00	7.355.200,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	7.355.200,00	7.355.200,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.134.400,00	4.134.400,00	0,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	4.134.400,00	4.134.400,00	0,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	4.134.400,00	4.134.400,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	49.876.134.018,00	49.967.975.018,00	91.841.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.594.013.500,00	15.685.854.500,00	91.841.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	2.120.000.000,00	2.120.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	13.474.013.500,00	13.565.854.500,00	91.841.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	34.282.120.518,00	34.282.120.518,00	0,00

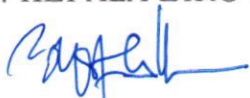
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	41.013.000,00	41.013.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.363.876.518,00	1.363.876.518,00	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	32.551.017.000,00	32.551.017.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	288.714.000,00	288.714.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	16.543.132.316,00	16.543.132.316,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	16.543.132.316,00	16.543.132.316,00	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	16.543.132.316,00	16.543.132.316,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	906.342.896.054,00	906.342.896.054,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	891.607.849.054,00	891.607.849.054,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	888.380.391.024,00	888.380.391.024,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	527.444.733.500,00	527.444.733.500,00	0,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	11.511.550.000,00	11.511.550.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	297.772.474.586,00	297.772.474.586,00	0,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	41.491.632.938,00	41.491.632.938,00	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.227.458.030,00	3.227.458.030,00	0,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	2.277.458.030,00	2.277.458.030,00	0,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	14.235.047.000,00	14.235.047.000,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	14.235.047.000,00	14.235.047.000,00	0,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	14.035.047.000,00	14.035.047.000,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	693.419.421.016,00	696.923.014.016,00	3.503.593.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	602.948.017.016,00	606.451.610.016,00	3.503.593.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	507.207.672.451,00	510.711.265.451,00	3.503.593.000,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	395.898.108.285,00	399.401.701.285,00	3.503.593.000,00
5.2.04.01.01.0008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang	109.235.000.000,00	109.235.000.000,00	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.074.564.166,00	2.074.564.166,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	95.740.344.565,00	95.740.344.565,00	0,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	95.740.344.565,00	95.740.344.565,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	33.163.404.000,00	33.163.404.000,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	28.330.404.000,00	28.330.404.000,00	0,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	7.533.804.000,00	7.533.804.000,00	0,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	20.796.600.000,00	20.796.600.000,00	0,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.083.000.000,00	1.083.000.000,00	0,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	1.083.000.000,00	1.083.000.000,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	57.308.000.000,00	57.308.000.000,00	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	57.308.000.000,00	57.308.000.000,00	0,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	57.308.000.000,00	57.308.000.000,00	0,00

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.647.000.000,00	3.647.000.000,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3.647.000.000,00	3.647.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.647.000.000,00	3.647.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	3.647.000.000,00	3.647.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	153.211.401.623,00	145.853.078.857,00	-7.358.322.766,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	153.211.401.623,00	145.853.078.857,00	-7.358.322.766,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	153.211.401.623,00	145.853.078.857,00	-7.358.322.766,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	153.211.401.623,00	145.853.078.857,00	-7.358.322.766,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	153.211.401.623,00	145.853.078.857,00	-7.358.322.766,00
5.4	BELANJA TRANSFER	382.500.453.306,00	382.500.453.306,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	322.500.453.306,00	322.500.453.306,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	322.500.453.306,00	322.500.453.306,00	0,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	322.500.453.306,00	322.500.453.306,00	0,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	322.500.453.306,00	322.500.453.306,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	4.820.033.558.744,00	4.820.033.558.744,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-501.817.992.567,00	-501.817.992.567,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	501.817.992.567,00	501.817.992.567,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	501.817.992.567,00	501.817.992.567,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	1.998.509.000,00	1.998.509.000,00	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	1.998.509.000,00	1.998.509.000,00	0,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.998.509.000,00	1.998.509.000,00	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.01.03.01.0002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.01.06	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	125.889.879.318,00	125.889.879.318,00	0,00
6.1.01.06.01	Uang Jaminan	125.889.879.318,00	125.889.879.318,00	0,00
6.1.01.06.01.0001	Uang Jaminan	125.889.879.318,00	125.889.879.318,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	363.929.604.249,00	363.929.604.249,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	363.929.604.249,00	363.929.604.249,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	501.817.992.567,00	501.817.992.567,00	0,00

	Pembiayaan Netto	501.817.992.567,00	501.817.992.567,00	0,00
KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006